

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya pembangunan berkelanjutan dewasa ini, meningkat pula kebutuhan akan pendanaan oleh masyarakat. Salah satu cara untuk mendapatkan dana tersebut adalah melalui penggunaan fasilitas perkreditan, baik kredit melalui bank maupun lembaga non bank (lembaga pembiayaan/leasing) selaku penyedia dana.

Pengertian kredit di atas, didalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Tentunya, yang namanya kredit tidak terlepas dari adanya pengikatan suatu jaminan, sehingga dengan adanya fasilitas kredit dari kreditur, maka atas prestasinya kreditur meminta adanya jaminan/agunan guna menjamin hutang-hutang debitur bilamana debitur cidera janji/wanprestasi. Di dalam menyalurkan kredit kepada debitur, kreditur harus memperhatikan beberapa faktor sebagai penilaian kelayakannya, salah satunya berupa penilaian tentang adanya jaminan.

Dalam pemberian kredit oleh bank, selalu diperhatikan prinsip 5 C yaitu *Character* (Kepribadian), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), dan *Collateral* (Agunan). Terhadap *Collateral* (Agunan/Jaminan) bank memberikan pertimbangan khusus untuk merealisasi suatu kredit kepada debitur, adapun tujuannya untuk menjamin keberadaan kredit debitur terhadap suatu kemungkinan resiko macetnya kredit tersebut. Jaminan merupakan suatu keutamaan disamping persyaratan yang lain, maka bank sering meminta atau justru mewajibkan adanya jaminan atas pemberian kreditnya kepada debitur, dengan lain perkataan Bank dalam rangka mengamankan kepentingannya, maka tidak dilarang meminta suatu jaminan.

Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, jaminan merupakan hal yang sangat vital demi keamanan pengembalian dana yang telah diberikan kepada kreditur dan untuk kepastian hukumnya.¹ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1131 ditentukan jaminan umum yang telah diberikan oleh undang-undang yang mempunyai sifat konkurensi. Segala kebendaan seorang debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian, menjadi jaminan untuk segala perikatannya secara perseorangan.

Mengenai masalah jaminan, bank akan menerapkan *policy* yang memberikan nilai efisiensi, keamanan, biaya, keuntungan dan tentu juga

¹ Sri Soedewi Masjchun Sofwan. 1997. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : UGM Press, halaman 7.

kaitannya dengan pengembangan pasar produk yang lain.² Pada dasarnya *policy* tersebut tetap memperhatikan aspek legalitas dan aspek profitabilitas.

Di dunia perbankan dikenal adanya suatu lembaga jaminan yang di dasarkan atas kepercayaan, yaitu *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* (FEO) yang dikenal/disingkat dengan nama fidusia. Lembaga jaminan ini sebelumnya tidak di atur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus, namun sejak tanggal 30 September 1999 pemerintah telah mengundang Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Lembaga jaminan ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contracia*, artinya yaitu suatu janji (berupa) kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas hutangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila hutangnya sudah dibayar lunas.³ Dalam hal *fiducia cum creditore* pemberi fidusia tetap menguasai benda obyek fidusia. Dengan tetap menguasai benda tersebut pemberi fidusia dapat menggunakan benda tersebut.

Lembaga jaminan fidusia sebagaimana yang dikenal dalam bentuk *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* (FEO) yaitu peralihan hak milik secara kepercayaan, hal ini timbul berkenaan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara tentang gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan

² Ridzki Djunaidi. 2000. *Beberapa Permasalahan Hukum dan Jaminan*, Jakarta : BPPN, halaman 2.

³ J. Satrio. 1991. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 166.

benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya. Maka dari itu selanjutnya lahirlah lembaga FEO tersebut.

Diundangkannya Undang-undang Jaminan Fidusia, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”, sedangkan Jaminan Fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Dalam hal ini yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor, namun setelah adanya Undang-undang Jaminan Fidusia diberikan pengertian lebih luas yaitu benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.

Di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia diatur tentang pembebanan jaminan fidusia, maka untuk memberikan kepastian hukum maka pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 / 1999). Juga dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Didalam pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa :

“Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

Selanjutnya dalam pasal 5 disebutkan :

“(1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia; (2) Terhadap

pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Dari kedua pasal tersebut di atas, diketahui bahwa dalam jaminan fidusia, setelah adanya suatu perjanjian pokok terdapat perjanjian yang mengikuti sebagai perjanjian ikutan berupa perjanjian penjaminan yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, maka perjanjian tersebut dituangkan dalam sebuah akta yang disebut sebagai Akta Jaminan Fidusia atau disebut sebagai Pembebanan Jaminan Fidusia.

Dengan demikian adanya Undang-undang Jaminan Fidusia maka segala perintah tentang pembebanan hingga pendaftaran fidusia serta eksekusi objek benda jaminan fidusia diatur dalam undang-undang tersebut. Keberadaan lembaga jaminan fidusia dalam praktek sangat dibutuhkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak baik kreditur, debitur maupun kepada pihak ketiga lainnya yang beritikad baik.

Berdasarkan uraian paragraf-paragraf di atas, penulis tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia khususnya dalam hal pembebanan jaminan dengan membuat konstruksi judul : “PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT (Studi pada Kantor Notaris di Surakarta)”.

B. Pembatasan Masalah

Untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan judul penelitian, maka penulis hanya membatasi pada pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit pada Kantor Notaris Prasetyawan, SH., M.Kn. Kemudian, karena kesepakatan antara penulis dengan pihak Notaris bersangkutan, pada halaman-halaman selanjutnya tidak akan ditampilkan atau disebutkan nama dari Notaris tersebut, dan hanya akan disebutkan “pada Kantor Notaris di Surakarta”.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada Kantor Notaris di Surakarta ?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit tersebut ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada Kantor Notaris di Surakarta.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada Kantor Notaris di Surakarta beserta hambatan-hambatan dan cara mengatasinya.
2. Memberikan sumbangan, masukan, dan informasi kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui tentang pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada Kantor Notaris di Surakarta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah *deskriptif kualitatif*,⁴ yang dimaksudkan adalah untuk menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada Kantor Notaris di Surakarta.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Sosiologis*,⁵ dalam perspektif yuridis bermaksud menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum, aspek-aspek hukum perihal pembebanan fidusia, dan dalam perspektif empiris dimaksudkan untuk

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1994, halaman 103.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, dalam Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum diakhir Abad 20*, Bandung : Alumni, 1994, halaman 24.

mengetahui pelaksanaannya pada Kantor Notaris di Surakarta beserta hambatan-hambatan dan cara mengatasinya.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dilokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu yang berupa dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris di Surakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara :

1) Observasi (pengamatan)

Yaitu pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada Kantor Notaris di Surakarta.

2) Interview (wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden yaitu pihak-

pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada Kantor Notaris di Surakarta.

3) Questioner

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara tidak langsung atau tertulis dengan responden.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu untuk mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi pustaka yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menelaah literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan tentang pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada Kantor Notaris di Surakarta.

5. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini dilakukan secara kualitatif yaitu teknik analisis data yang bertujuan mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi kepustakaan yaitu peraturan-peraturan tentang pembebanan fidusia, kemudian dipadukan dengan pendapat responden di lapangan yaitu tentang pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada Kantor Notaris di Surakarta, dan dari hasil analisis tersebut disimpulkan secara deduktif⁶ dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

⁶ Lexy J. Moleong, *Op., Cit.*

F. Sistematika Skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit
 - 1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Kredit Bank
 - 2. Isi dan Bentuk Perjanjian Kredit
 - 3. Jaminan dalam Perjanjian Kredit
 - 4. Berakhirnya Perjanjian Kredit
- B. Tinjauan Umum Tentang Fidusia
 - 1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia
 - 2. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia
 - 3. Pembebanan Jaminan Fidusia
 - 4. Pendaftaran Jaminan Fidusia
 - 5. Eksekusi Jaminan Fidusia

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Dokumen Akta Jaminan Fidusia dan Tata Cara Pembebanan Fidusia dengan akta Notaris sebagai jaminan kredit bank.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit pada Kantor Notaris di Surakarta.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit pada Kantor Notaris di Surakarta.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit pada Kantor Notaris di Surakarta dan cara mengatasinya.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN